

## Pembebasan Kaum Perempuan dalam Tradisi Pendidikan Islam: Analisis Historis dan Kontemporer

Subhi Amali

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: subhiamali.futura@gmail.com

Andewi Suhartini

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: andewi.suhartini@uinsgd.ac.id

### Abstract

*This research explores complex issues related to Islamic education, social transformation, and gender inequality in society. The method used in this study is the literature review method, which is data collection by identifying relevant literature and then analyzed. The results of this research found that Islamic education not only contains religious aspects, but also reflects long socio-cultural dynamics. Problems such as slavery, colonialism, and power hegemony also influenced the complexity of Islamic education, with acculturation of values extending to various parts of the world. In addition, various views on the backwardness of women from the Structural Functionalism school to Marxist and Socialist feminism provide diverse insights. The importance of critical reflection on the values and practices of Islamic education is also highlighted in creating an inclusive society that supports gender equality. Although the concept of equality between women and men exists in Islam, social reality often does not reflect it, with strict social restrictions, especially regarding the role of women in society. However, views such as those expressed by Mernissi and Islamic historians show that women have equal rights and potential, prompting the need for a review of religious interpretations to create a more inclusive understanding and support gender equality.***Keywords** : Education, Women, Gender

### Abstrak

*Penelitian ini menggali permasalahan kompleks terkait dengan pendidikan Islam, transformasi sosial, dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi literatur yang relevan kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pendidikan Islam tidak hanya memuat aspek keagamaan, namun juga mencerminkan dinamika sosial budaya yang panjang. Permasalahan seperti perbudakan, penjajahan, dan hegemoni kekuasaan turut memengaruhi kompleksitas pendidikan Islam, dengan akulturasi nilai-nilai yang meluas hingga ke berbagai belahan dunia. Selain itu, berbagai pandangan tentang keterbelakangan kaum perempuan dari aliran Struktural Fungsionalisme hingga feminisme Marxis dan Sosialis memberikan wawasan yang beragam. Pentingnya refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan praktek pendidikan Islam juga disoroti dalam menciptakan masyarakat inklusif yang mendukung kesetaraan gender. Meskipun konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ada dalam Islam, realitas sosial seringkali tidak mencerminkannya, dengan adanya pembatasan sosial yang ketat, terutama terkait peran perempuan dalam masyarakat. Namun, pandangan seperti yang diutarakan oleh Mernissi dan sejarawan Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan potensi yang sama, mendorong perlunya kajian ulang terhadap*

*interpretasi agama untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender.*

**Kata Kunci:** Pendidikan, Perempuan, Gender.

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang, baik dalam dimensi kuantitatif maupun kualitatif, demi mencapai kedewasaan sebagai manusia yang sejati. Untuk mewujudkan potensi ini, pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang tak terhindarkan. Dalam perjalanan pendidikan, banyak pihak yang terlibat dalam membimbing individu, mulai dari keluarga yang menjadi pondasi pertama, masyarakat sebagai lingkungan sosial, lembaga pendidikan baik formal maupun informal, hingga peran politik yang membentuk kerangka kebijakan pendidikan negara (Sutrisman, 2019).

Menurut Handalani (2018) Isu ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi kaum perempuan menjadi perhatian utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tercermin dalam tujuan kelima dari Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu "*Gender Equality and Women's Empowerment*". United Nations Development Program (UNDP) telah memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai alat ukur ketimpangan gender di berbagai negara.

GII ini terdiri dari tiga dimensi sebagai indikator perhitungannya, meliputi kesehatan reproduksi yang diukur melalui angka kematian ibu dan kelahiran remaja, pemberdayaan yang dinilai dari proporsi kursi parlemen yang diisi oleh perempuan, serta capaian di bidang pendidikan menengah dan tinggi berdasarkan jenis

kelamin, dan aktivitas ekonomi yang diukur melalui tingkat partisipasi pasar tenaga kerja bagi perempuan dan laki-laki.

Menurut Amalia (2022), Human Development Report Indonesia memiliki GII sebesar 0.451. Angka ini mengindikasikan bahwa dari setiap 100.000 kelahiran, 126 perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan. Sementara itu, angka kelahiran remaja per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun mencapai 47,4. Dalam dimensi pemberdayaan, data menunjukkan bahwa hanya 19,8% kursi parlemen dipegang oleh perempuan, dan proporsi perempuan dewasa yang telah mencapai pendidikan menengah sebesar 44,5%, sedangkan laki-laki mencapai 53,2%.

Keterlibatan berbagai elemen dalam pendidikan berkontribusi dalam membentuk karakter individu, yang pada akhirnya menentukan sikap dan pandangan hidupnya. Hal ini mencakup apakah seseorang akan bersikap pasif dan mentaati keadaan sosial dan lingkungannya, atau aktif dan kritis dalam merumuskan ide-ide perubahan yang menuju ke arah yang lebih manusiawi. Namun, tantangan muncul dengan adanya fenomena diskriminasi yang masih melekat kuat dalam budaya politik dan sosial masyarakat saat ini (Syahroni, 2017).

Diskriminasi bukan hanya menjadi isu yang menghambat pertumbuhan individual, namun juga mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Lebih lanjut, praktik diskriminasi gender sering kali ditemukan dalam proses pembelajaran

dan kajian keilmuan, memperparah kondisi yang ada. Di tengah-tengah semua ini, pendidikan formal tampaknya belum sepenuhnya memasukkan konsep kesetaraan gender sebagai bagian dari studi inti.

Kajian mengenai kesetaraan gender masih terjebak dalam wacana, tanpa formulasi yang jelas tentang bagaimana kesetaraan gender dapat diakomodasi secara sah dalam kehidupan sosial dan kebijakan kenegaraan. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana peran pendidikan Islam dalam mendukung kesetaraan gender, terutama saat masih ada kontradiksi di antara berbagai elemen kekuatan sosial dalam Islam.

Sebagai penutup, pentingnya pendidikan sebagai instrumen pembebasan dan pengembangan individu menjadi semakin krusial dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya kontemporer. Diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan merangkul semua aspek kehidupan, termasuk kesetaraan gender dalam konteks pendidikan Islam.

## **Metode**

Metode yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini akan berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan dokumen lain yang relevan dengan tema (Sari & Asmendri, 2020). Seleksi literatur dilakukan secara sistematis dari berbagai basis data akademik dan perpustakaan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai sejarah dan perkembangan pemikiran mengenai

pembebasan kaum perempuan dalam pendidikan Islam.

Langkah selanjutnya adalah analisis kritis terhadap literatur yang telah terkumpul. Analisis akan difokuskan pada pemahaman konsep pembebasan kaum perempuan dalam tradisi pendidikan Islam, baik dari perspektif historis maupun kontemporer. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender diimplementasikan dalam pendidikan Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam proses pembebasan kaum perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur mengenai peran pendidikan Islam dalam upaya pembebasan dan pemberdayaan kaum perempuan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Permasalahan Pendidikan dalam Transformasi Sosial: Sebuah Perspektif Historis**

Permasalahan pendidikan sebagai bagian dari transformasi sosial telah menjadi isu yang berulang dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah ini mengacu pada perbedaan esensial antara materi pendidikan umum dan agama, serta antara sekolah dan madrasah, yang semuanya terbentuk melalui proses sosial budaya yang panjang (Hidayat & Wijaya, 2016). Isu pendidikan Islam menjadi semakin kompleks ketika dihubungkan dengan citra individu dan masyarakat, seperti isu perbudakan, penjajahan, hegemoni kekuasaan, dan pengaruh modernitas dalam konteks kapitalisme yang menekan

masyarakat miskin di negara-negara berkembang, serta pandangan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Akulturasi nilai-nilai ini tidak hanya terjadi di Timur Tengah tetapi juga di banyak negara lainnya (Arif, 2015).

Transformasi dalam bidang ilmu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa itu. Rasulullah SAW dalam menyampaikan ayat al-Qur'an dan Sunnah-nya menunjukkan hubungan yang erat dengan upaya pembebasan masyarakat dari dominasi kaum Quraisy (Engineer, 2007). Begitu juga dalam konteks negara-negara miskin, ada upaya pembebasan masyarakat dari buta huruf, seperti yang dilakukan Blayerd di Brazil, pembebasan dari kebodohan oleh Ki Hadjar Dewantara di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dan kebangsaan, serta upaya penyelamatan masyarakat lemah dari penindasan di India oleh Teresa. Berbagai hal ini menunjukkan bahwa aspek politik sangat mempengaruhi konsep pendidikan.

Dinamika pendidikan nasional cenderung mengalami dua arah, yaitu upaya untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang sains dengan memisahkan ilmu agama dan umum, serta peran politik dalam mengatur, mengendalikan, dan membatasi kebebasan berekspresi dalam bidang keilmuan. Hal ini dapat dilihat melalui sejarah pendidikan nasional, mulai dari era Ki Hadjar Dewantara hingga saat ini, yang menunjukkan adanya perubahan dinamis dalam kurikulum yang sering berubah sesuai kebijakan penguasa, serta minimnya perhatian terhadap pendidikan dibandingkan dengan anggaran yang lebih dominan dialokasikan untuk keperluan militer (Pirol, 2017).

Berdasarkan beberapa pandangan diatas bahwa permasalahan pendidikan dan transformasi sosial adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dan terus berkembang seiring dengan evolusi peradaban manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, kita dapat melihat bahwa istilah ini merujuk pada perbedaan mendasar antara materi pendidikan umum dan agama, serta antara sekolah dan madrasah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial budaya yang panjang.

Isu pendidikan Islam menjadi semakin kompleks ketika dihubungkan dengan isu-isu sosial yang lebih luas, seperti perbudakan, penjajahan, dan hegemoni kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga berperan dalam menanggapi isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Fenomena akulturasi nilai-nilai ini bukan hanya terbatas pada Timur Tengah, tetapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia.

Mengingat bahwa transformasi dalam bidang ilmu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa tertentu. Contohnya adalah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ajaran al-Qur'an dan Sunnah-nya yang erat kaitannya dengan pembebasan masyarakat dari dominasi kaum Quraisy. Selain itu, ada upaya pembebasan dari buta huruf di Brazil, upaya pembebasan kebodohan di Indonesia oleh Ki Hadjar Dewantara, serta upaya penyelamatan masyarakat lemah di India oleh Teresa. Ini semua menunjukkan betapa

pentingnya peran politik dalam membentuk konsep pendidikan.

Terakhir, dinamika pendidikan nasional menunjukkan dua arah yang berlawanan, yaitu upaya untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang sains dengan memisahkan ilmu agama dan umum, serta dominasi politik dalam mengatur dan mengendalikan keilmuan. Melalui sejarah pendidikan nasional, kita dapat melihat perubahan kurikulum yang sering berubah sesuai dengan kebijakan penguasa, serta minimnya perhatian terhadap pendidikan dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk keperluan militer. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan sering kali menjadi korban dari dinamika politik dan prioritas pemerintah.

### **Hegemoni Kekuasaan dan Keterbatasan Ruang Gerak Perempuan dalam Social Construction**

Perkembangan selanjutnya, pencitraan diri terhadap pendidikan Islam berkaitan dengan pencitraan diri dari sifat-sifat tersebut di atas menyebabkan perbedaan peran masing-masing pendidikan. Dalam hal ini negara bermuka dua, peran sains berkiblat pada Eropa, dalam kondisi anggaran pendidikan yang rendah mengakibatkan kesulitan dalam penyesuaian penemuan teknologi Barat. Dalam hal lain, hegemoni kekuasaan menindas kaum perempuan dan membatasi ruang gerak perempuan dalam social construction. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab gender seperti itu dalam banyak kasus sering menimbulkan permasalahan dan ketidakadilan. Berkaitan dengan pencitraan diri, pembagian tugas dan wewenang yang mengakibatkan ketidakadilan. Islam sering mendapat sorotan dan kecaman, Islam sering dituduh

melegitimasi pencitraan diri dan perbedaan peran tersebut (Halwati, 2006).

Kontroversi pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut banyak pihak antara lain karena kitab-kitab fiqh yang ada selama ini menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam sering dituduh menghambat kemajuan dan membatasi gerak wanita. Terlepas dari benar tidaknya tuduhan tersebut, realitas saat ini membuktikan bahwa adanya gender dan perbedaan peran laki-laki-perempuan telah menyebabkan posisi perempuan makin tersudutkan, termasuk perempuan-perempuan di negara-negara muslim.

Kenyataan ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Halwati (2006) ditunjukkan dengan adanya perempuan di sebagian besar negara-negara muslim memang mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan, serta berada pada posisi bawah, baik dalam hal politik, hukum, sosial budaya, maupun ekonomi. Negara-negara yang dimaksud di atas misalnya Mesir, Irak, Arab Saudi, India, Pakistan, dan termasuk Indonesia. Pada umumnya perempuan di negara tersebut tidak banyak pengaruhnya dalam penentuan kebijakan politik, walaupun ada sebagian perempuan yang berperan di sektor politik dan hukum, namun mereka tidak banyak mempengaruhi kebijakan politik dan undang-undang. Hal yang lebih penting lagi, biasanya perempuan yang bekerja di sektor publik kebanyakan hanya sebagai buruh pabrik dengan upah yang minim apabila dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Perempuan-perempuan tersebut tetap harus mencari nafkah walaupun bukan tanggung jawab gender. Ilustrasi di atas sering terjadi di negara-

negara yang mayoritas muslim. Oleh karena itu, kajian tentang citra diri perempuan terutama mengenai ketidak-adilan gender, keterbelakangan dan hak-hak perempuan menjadi urgen.

Menurut pandangan yang telah disampaikan, kompleksitas hubungan antara pencitraan diri dalam pendidikan Islam dan realitas sosial yang ada. Terdapat dualitas yang jelas dalam pendekatan pendidikan di negara-negara yang mencoba menggabungkan nilai-nilai tradisional dan kemajuan ilmiah. Di satu sisi, ada usaha untuk mengikuti tren sains Eropa, tetapi kondisi anggaran pendidikan yang terbatas menjadi hambatan dalam penyesuaian terhadap teknologi Barat. Di sisi lain, hegemoni kekuasaan mendorong pembatasan terhadap peran dan ruang gerak perempuan dalam konstruksi sosial.

Pembagian peran dan tanggung jawab gender yang telah ada dalam ajaran Islam sering menjadi subjek kontroversi. Kitab-kitab fiqh tradisional sering kali dianggap sebagai penyebab dari pembedaan peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi alasan tuduhan bahwa Islam menghambat kemajuan dan gerak perempuan. Meskipun kebenaran dari tuduhan ini masih menjadi perdebatan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, seringkali mengalami keterbelakangan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam banyak negara seperti Mesir, Irak, Arab Saudi, India, Pakistan, dan termasuk Indonesia, perempuan jarang memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan kebijakan politik. Meskipun ada sebagian perempuan yang aktif di sektor

politik dan hukum, kontribusi mereka seringkali tidak sebanding dengan jumlah dan dampak yang dihasilkan. Selain itu, di sektor publik, perempuan sering ditempatkan dalam pekerjaan dengan upah rendah, seperti buruh pabrik, yang menunjukkan ketidakadilan gender dalam lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, kajian mengenai citra diri perempuan, khususnya terkait dengan ketidakadilan gender, keterbelakangan, dan hak-hak perempuan, menjadi sangat penting dan mendesak. Ini menekankan perlunya refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan praktek pendidikan Islam serta penerapannya dalam masyarakat, agar dapat menciptakan pendidikan yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

### **Perspektif Global tentang Keterbelakangan Kaum Perempuan**

Dalam menghadapi masalah keterbelakangan kaum perempuan yang merajalela di berbagai negara di seluruh dunia, terdapat sejumlah perspektif yang berbeda mengenai akar masalah serta solusi yang dapat diambil. Ada dua aliran utama dalam ilmu sosial yang membentuk pandangan-pandangan tersebut.

Pertama, aliran Struktural Fungsionalisme yang melihat bahwa status quo harus dijaga, termasuk dalam hal hubungan antara perempuan dan laki-laki. Aliran ini berpendapat bahwa kondisi saat ini harus dipertahankan dan perubahan hanya boleh dilakukan dengan cara yang terkendali, tanpa menggoyahkan stabilitas sosial. Kaum feminisme liberal memiliki pandangan berbeda, menganggap bahwa keterbelakangan perempuan dan dominasi laki-laki dalam masyarakat disebabkan oleh

ketidak setaraan kesempatan. Mereka berjuang untuk menciptakan struktur masyarakat yang memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk semua individu, termasuk perempuan.

Kedua, aliran Sosiologi Konflik yang beranggapan bahwa konflik kepentingan adalah motor perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, aliran ini melihat adanya konflik antara kepentingan kedua jenis kelamin sebagai akar masalah keterbelakangan perempuan. Bias dalam pandangan ini muncul dalam bentuk radikalisme, yang seringkali menekankan kemandirian perempuan tanpa ketergantungan pada laki-laki (Shiva, 1997).

Selanjutnya, berbagai aliran lainnya seperti feminisme Marxis dan Sosialis menawarkan perspektif yang lebih kritis terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sangat mendukung keterbelakangan perempuan. Mereka mengidentifikasi bahwa keterbelakangan perempuan tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh struktur-struktur masyarakat yang lebih besar, seperti kapitalisme dan patriarki. Solusi yang mereka tawarkan seringkali berfokus pada restrukturisasi masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender (Retnani, 2017).

Para teolog feminin, di sisi lain, melihat keterbelakangan perempuan sebagai hasil dari penafsiran ajaran agama yang dipengaruhi oleh ideologi patriarki. Mereka menekankan perlunya reinterpretasi ajaran agama untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

Pandangan Fatima Mernissi, seorang tokoh feminin dari Maroko, mengemukakan bahwa keterbelakangan perempuan di negara-negara Muslim disebabkan oleh penghentian revolusi sosial yang dilakukan Rasulullah, khususnya dalam konteks hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, Nawal Sadali dari Mesir berpendapat bahwa untuk mengubah keadaan perempuan, penting untuk mengubah pola pikir perempuan itu sendiri (Hamdi, 2017).

Dengan demikian, berbagai pandangan ini memberikan wawasan yang beragam mengenai akar masalah keterbelakangan kaum perempuan dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan pandangan yang telah diungkapkan dalam menghadapi masalah keterbelakangan yang mempengaruhi kaum perempuan di seluruh dunia, terdapat beragam perspektif yang diungkapkan oleh para peneliti dan pemikir sosial. Menurut Fakih, ada dua aliran utama yang dominan dalam ilmu sosial yang membentuk pandangan-pandangan tersebut.

Pertama, aliran Struktural Fungsionalisme mengusulkan bahwa status quo dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki harus dijaga. Mereka percaya bahwa perubahan yang diinginkan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas sosial. Di sisi lain, feminisme liberal menganggap bahwa keterbelakangan perempuan dan dominasi laki-laki dalam masyarakat terjadi karena adanya ketidaksetaraan kesempatan. Mereka berjuang untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Kedua, aliran Sosiologi Konflik percaya bahwa konflik kepentingan adalah pendorong utama perubahan dalam masyarakat. Mereka mengidentifikasi konflik antara laki-laki dan perempuan sebagai akar masalah keterbelakangan perempuan. Pandangan ini seringkali mendorong radikalisme, yang menekankan kemandirian perempuan tanpa ketergantungan pada laki-laki.

Selanjutnya, aliran feminisme Marxis dan Sosialis menawarkan analisis yang lebih tajam terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung keterbelakangan perempuan. Mereka menekankan bahwa masalah ini tidak hanya berasal dari tindakan individu, melainkan juga dari sistem yang lebih besar seperti kapitalisme dan patriarki. Solusi yang mereka tawarkan seringkali berfokus pada perubahan mendasar dalam struktur masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender.

### **Konsep Keadilan Gender dalam Islam**

Secara prinsip, Islam mengakui kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek spiritual dan intelektual, dengan perbedaan utama terletak pada aspek biologis. Walau begitu, Mernissi sepakat dengan pandangan al-Qur'an yang menyatakan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun ia menafsirkannya dalam konteks ekonomi yang dominan pada masyarakat Arab saat itu. Menurut Mernissi, kelebihan ini berkaitan dengan nafkah dan tidak berdampak pada martabat atau dimensi spiritual dan intelektual (Umar, 2014).

Mernissi juga mendukung partisipasi aktif perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam kepemimpinan. Ia

merujuk pada pandangan syekh al-Ghazali yang memungkinkan perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan berdasarkan kisah Ratu Saba' yang diuraikan dalam al-Qur'an. Ratu Saba' digambarkan sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, mampu mengarahkan rakyatnya menuju keberhasilan dan kemakmuran (Binaningrum, n.d.).

Dalam dimensi spiritual, Mernissi meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki surga, dan hal ini tercermin dalam aktivitas ibadah yang mereka lakukan. Para sejarawan Islam telah mengakui kontribusi penting perempuan dalam sejarah awal Islam, tidak hanya sebagai ibu dan pasangan dari laki-laki berkuasa, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah manusia. Sumbangan perempuan ini diakui dalam literatur awal Islam, baik sebagai penafsir al-Qur'an maupun sebagai periwayat hadis (KHOIRIYAH, n.d.).

Namun, meskipun perempuan mendapatkan tempat yang terhormat dalam sejarah Islam, baik dari segi normatif maupun historis, citra perempuan mengalami penurunan dalam perkembangan sejarah berikutnya. Beberapa faktor kontemporer yang mempengaruhi perubahan citra perempuan, terutama di negara-negara Muslim, antara lain adalah batasan-batasan sosial yang ketat dan pembagian kekuasaan yang membedakan antara yang berkuasa dan yang tidak. Selain itu, superioritas perempuan dalam aspek daya tarik fisiknya seringkali menghasilkan pembatasan kekuatan perempuan dalam institusi sosial seperti perkawinan



. Dari pandangan yang telah diuraikan dalam perspektif Islam, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki diakui khususnya dalam aspek spiritual dan intelektual, meskipun ada perbedaan biologis yang jelas. Mernissi, seorang pemikir Islam, sejalan dengan ajaran al-Qur'an yang menegaskan kelebihan laki-laki, tetapi ia menafsirkannya dalam konteks ekonomi masyarakat Arab pada zaman itu. Menurutnya, kelebihan yang disebutkan dalam al-Qur'an berhubungan dengan nafkah, bukan martabat, spiritual, atau intelektual.

Mernissi juga memandang bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam ranah publik dan memegang posisi kepemimpinan. Ia mengacu pada pandangan syekh al-Ghazali dan kisah Ratu Saba' dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan berpengaruh.

Dalam hal spiritual, Mernissi percaya bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki surga, yang tercermin dalam praktik ibadah mereka. Kontribusi perempuan dalam sejarah awal Islam diakui sebagai peserta aktif dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah, bukan hanya sebagai ibu atau pendamping laki-laki berkuasa, melainkan juga sebagai penafsir al-Qur'an dan periwayat hadis.

Namun, citra perempuan dalam Islam mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor kontemporer seperti batasan sosial yang ketat, pembagian kekuasaan yang tidak merata, dan superioritas perempuan dalam aspek daya tarik fisik seringkali membatasi peran dan kekuatan perempuan dalam

institusi sosial, terutama dalam konteks perkawinan.

## **Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan kompleks yang terkait dengan pendidikan Islam, transformasi sosial, serta ketidaksetaraan gender dalam masyarakat meliputi: Pertama, pendidikan Islam tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika sosial budaya yang panjang. Dalam konteks ini, permasalahan seperti perbudakan, penjajahan, dan hegemoni kekuasaan turut mempengaruhi kompleksitas pendidikan Islam. Selain itu, terdapat akulturasi nilai-nilai yang meluas, yang tidak hanya terbatas pada wilayah Timur Tengah, tetapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia.

Kedua, perspektif tentang keterbelakangan kaum perempuan menyoroti berbagai aliran dalam ilmu sosial yang membentuk pandangan dan solusi terhadap masalah tersebut. Mulai dari aliran Struktural Fungsionalisme yang mempertahankan status quo hingga aliran feminisme Marxis dan Sosialis yang menawarkan restrukturisasi masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender, berbagai pandangan tersebut memberikan wawasan yang beragam. Selain itu, teks juga menyoroti pentingnya refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan praktek pendidikan Islam dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

Ketiga, dalam konteks Islam sendiri, terdapat konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek spiritual dan intelektual. Namun, realitas sosial seringkali tidak mencerminkan kesetaraan ini, dengan adanya pembatasan-

pembatasan sosial yang ketat, terutama terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat. Meskipun demikian, pandangan seperti yang diutarakan oleh Mernissi dan sejarawan Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan potensi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan bahwa interpretasi agama perlu dikaji ulang untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

### Daftar Pustaka

- Amalia, H. S. (2022). THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING IN THE EDUCATION SECTOR AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA, 2015-2019. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, Dan Akuntansi*, 3(2), 51–63.
- Arif, M. (2015). *Individualisme Global Di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Masyarakat Indonesia di Era Global)*. IAIN Kediri Press.
- Binaningrum, B. (n.d.). *GAGASAN PEREMPUAN BERKEMAJUAN (Studi Kesetaraan Gender Pada Organisasi Aisyiyah)*. FU.
- Engineer, A. A. (2007). *Islam dan pembebasan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Halwati, U. (2006). Kajian Dinamika Pendidikan-Diskursus Pendidikan Islam dalam Perspektif Pembebasan Hegemoni Kaum Perempuan. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 11(3), 337–347.
- Hamdi, S. (2017). *Pesantren & gerakan feminisme di Indonesia*. Iain Samarinda Press.
- Handalani, R. T. (2018). Determinant of human development index in Southeast Asia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(2), 118–137.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2016). *Ilmu pendidikan Islam: menuntun arah pendidikan Islam di Indonesia*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- KHOIRIYAH, I. M. (n.d.). *NARSISME PEREMPUAN DALAM TINJAUAN*.
- Pirol, A. (2017). *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Deepublish.
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme dalam perkembangan aliran pemikiran dan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Syahroni, S. (2017). Peranan orang tua dan sekolah dalam pengembangan karakter anak didik. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(1), 13–28.
- Umar, H. N. (2014). *Ketika fikih membela perempuan*. Elex Media Komputindo.